



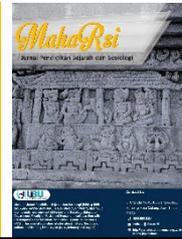
Maharsi : Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi

ISSN 656-2499 (print), **ISSN 2684-8686** (online)

Vol. 06, No. 02, Agustus 2024, pp. 46 – 59

Available online at:

<http://ejurnal.budiutomomalang.ac.id/index.php/maharsi>



Pengembangan Pariwisata Melalui Pembangunan Desa Wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat

Nur Mulatningsih¹, Bulkani², Biroum Bernardianto³

[✉ nurdisbudpar@gmail.com](mailto:nurdisbudpar@gmail.com)

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Indonesia.

Permalink/DOI

<https://doi.org/10.33503/maharsi.v6i2.4374>

Copyright © 2024, Maharsi : Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi. All right reserved

How to Cite

Mulatningsih, Nur., dkk. (2024). Pengembangan Pariwisata Melalui Pembangunan Desa Wisata Di Kabupaten Kotawaringin Barat. Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi, 6 (02), 46-59. <https://doi.org/10.33503/maharsi.v6i2.4374>

ABSTRAK

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki berbagai potensi yang dapat dijadikan sebagai Desa Wisata. Pada tahun 2021 Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengeluarkan aturan tentang desa wisata dan ditahun berikutnya yaitu 2022 setelah diterbitkan SK tim penilai dan Verifikasi serta penetapan 17 desa wisata. Dari 17 desa wisata terdapat 2 desa wisata yang mendapatkan prestasi tingkat nasional yaitu prestasi juara 2 Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Desa Sei Kekonyer tahun 2022 dan juara Harapan pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 dalam kategori *Homestay* dan Toilet. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pengembangan Pariwisata Melalui Pembangunan Desa Wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat. Penulis menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif dalam mengambil data, mengola data serta menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengembangkan desa wisata Dinas pariwisata melakukan berbagai kegiatan Pelatihan dan Pendampingan sehingga 2 Desa Wisata Mendapatkan penghargaan.

KATA KUNCI

Desa Wisata; Pengembangan Pariwisata; Prestasi

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU Kepariwisataan No. 10 tahun 2009 pasal 1 ayat 3, yang dimaksud dengan pariwisata adalah segala kegiatan wisata yang memiliki sarana serta prasarana yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Menurut pasal 3 dalam UU yang sama, fungsi dari pariwisata adalah memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pariwisata merupakan suatu bidang yang memiliki potensial dalam pembangunan suatu negara, karena membawa dampak positif dalam menggerakkan ekonomi rakyat. Daerah yang memiliki potensi pariwisata dapat menghidupkan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar dengan cara menghidupkan usaha-usaha skala kecil sampai menengah, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang kemudian dapat digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di daerah dan mencapai kesejahteraan (Yuningsih, 2005).

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi wisata yaitu di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah . Berdasarkan laporan Dinas Pariwisata (2016), menunjukan bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki beberapa objek wisata, seperti:

1. Wisata alam; Taman Nasional Tanjung Puting, Orangutan Care Center Quarantie (OCCQ), Pantai Kubu, Pantai Tanjung Keluang, Pantai Bogam, Pantai Keraya, Pantai Sabuai, Susur Sungai Arut, Pantai Tanjung Harapan, Taman Laut Senggora, Danau Gatal dan Danau Masaurayan.
2. Wisata budaya-Sejarah; Istana Kuning, Istana Alnursari, Istana Mangkubumi, Masjid Dan Makam Kyai Gede Dan Monument Palagan Samba.
3. Wisata desa adat; Desa Adat Pasir Panjang, Desa Adat Pandau, Riam Dan Panahan, Desa Adat Darat.
4. Agro wisata; Sawah Penati SP-1, Sawah Desa Barabai, Sulung Rach Dan Kebun Durian Montong.

Selain potensi diatas, terdapat juga beragam potensi yang dimiliki oleh desa-desa yang tersebar di enam Kecamatan yaitu Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kotawaringin Lama. Dinas Pariwisata yang merupakan sebuah instansi yang menjadi unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, mempunyai tugas dalam membantu Bupati untuk melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata serta pengambil kebijakan dalam pembangunan pariwisata. Secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian proses pembangunan. Menurut Spillane (2004), Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik. Hal tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk

meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Berdasarkan kewenangan itulah sehingga Dinas Pariwisata melakukan percepatan untuk mendorong kemajuan pariwisata khususnya “Desa Wisata”. Pada tahun 2021, Bupati Kotawaringin Barat telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2021 tentang Desa wisata. Setahun setelah diterbitkannya kebijakan tersebut maka Bupati mengeluarkan Keputusan Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penetapan Desa Wisata yaitu menetapkan tujuhbelas desa wisata berdasarkan hasil penilaian dan Verifikasi. Serta dua desa wisata lainnya yaitu (1). Desa Sei Kekonyer, juara dua Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) pada tahun 2022; (2). Desa Pasir Panjang, juara Harapan pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) pada tahun 2023 dalam kategori *Homestay* dan Toilet.

Walaupun demikian, berdasarkan fenomena dilapangan masih terdapat berbagai permasalahan yang muncul terkait dengan pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat seperti Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola Desa Wisata dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pengembangan Pariwisata Melalui Pembangunan Desa Wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat.

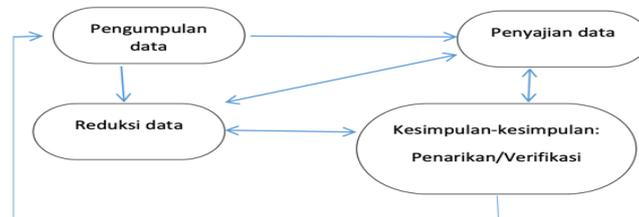
METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu merupakan metode dalam pendekatan suatu penelitian dengan menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan objek dan subjek penelitian berdasarkan suatu fakta yang nampak atau sebagaimana mestinya. Lokasi penelitian yaitu di Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi tentang kondisi wilayah obyek dilakukan untuk mengetahui potensi wisata yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah dan masyarakat sekitar yang dapat menunjang dan meningkatkan kesejahteraan, wawancara dan dokumentasi (Yuningsih, 2005). Fokus dari penelitian adalah Bagaimana Pengembangan Pariwisata Melalui Pembangunan Desa Wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sumber data penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan yang lainnya (Moleong, 2002). Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan (1). **Sumber data primer** adalah sumber data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden atau informan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang. dan (2). **Sumber Data Sekunder** adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, seperti

sumber yang berasal buku-buku, makalah, jurnal penelitian, serta dokumen-dokumen dan sumber lain yang relevan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan teori Miles dan Huberman (dalam Rijali, 2018) yang digambarkan pada gambar 1 berikut.

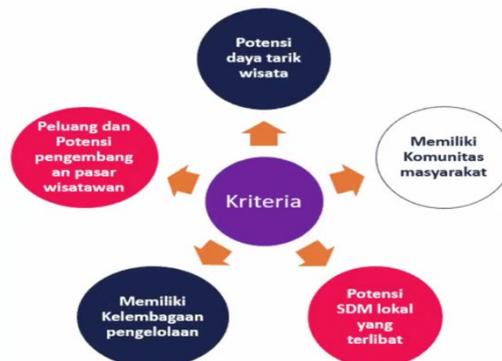


Gambar 1. Teknik Analisis Data Miles dan Huberman

Terdapat beberapa teknik yang dimulai dari 1) pengumpulan data, 2) penyajian data, 3) reduksi data dan 4) penarik kesimpulan. Pada tahapan awal yaitu pengumpulan data yang bersifat interaktif. pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Hasil reduksi data diolah sedemikian rupa supaya terlihat sosoknya secara lebih utuh yaitu dengan cara matriks, dan bentuk lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mendorong daerah-daerah yang memiliki potensi daya tarik wisata untuk mengembangkan 49 sektor pariwisata. Mengingat Indonesia memiliki 83.931 Desa dan 1.734 diantaranya adalah desa wisata (BPS, 2020). Jumlah desa wisata tersebut baru mencapai 2% dari total desa secara keseluruhan. Menurut Fanani (2019), pemerintah pusat menargetkan jumlah desa wisata bertambah menjadi 10.000 desa wisata di tahun 2020. Target pemerintah pusat tersebut bertujuan untuk menyediakan pariwisata alternative, memperluas lapangan pekerjaan, menekan angka kemiskinan dan lain sebagainya. Untuk itu dalam pengelolaannya memiliki lima kriteria seperti pada gambar 2.



Gambar 2. Kriteria Potensi Pariwisata

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa secara umum bahwa dengan adanya potensi yang dimiliki oleh desa diberbagai wilayah di Indonesia salah satunya Kalimantan Tengah, dapat dikelola oleh masyarakat setempat secara kolektif dengan memperhatikan keberlanjutan Lingkungan, Sosial budaya dan Ekonomi.

Di tahun 2021 Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan berbagai kegiatan diantaranya :

Identifikasi Potensi dan permasalahannya

Tim yang terdiri dari Bidang Sumberdaya Manusia (SDM) dan Kelembagaan, Sekretariat, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata melakukan identifikasi potensi desa yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata merupakan sebagai langkah awal untuk melakukan pemetaan. Identifikasi potensi dan masalah diberbagai desa Di Kecamatan Banteng, Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Arut Utara dan Kecamatan Kotawaringin Lama. Secara umum hasil identifikasi potensi yang dilakukan mengacu pada beberapa aspek seperti adanya daya tarik Obyek Wisata, akomodasi, fasilitas pelayanan, dan prasarana. Hal serupa juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim (2011), dimana dia mengatakan bahwa untuk mengembangkan obyek wisata diperlukan pemetaan atau identifikasi potensi wisata. Namun penelitian tersebut menggunakan GIS (*Geographic Information System*) berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata kabupaten Kotawaringin Barat, dimana dilakukan pemetaan secara langsung ke desa untuk melakukan identifikasi. Hal tersebut dilakukan agar Dinas Pariwisata mengetahui dan memahami selain potensi juga mengetahui berbagai permasalahan yang dialami oleh desa terkait dengan pengembangan berbagai potensi yang dimiliki diantaranya belum adanya kelembagaan ditingkat desa seperti Pokdarwis dan kelembagaan lainnya, kurangnya kualitas SDM, kurangnya publikasi, infrastruktur yang belum memadai, masih kurangnya investasi dan lain-lain. Permasalahan tersebut juga pernah diungkapkan oleh Nugroho (2020), dalam penelitiannya yang berjudul Beberapa Masalah Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Di Indonesia. Pada proses awal pengembangan desa wisata, permasalahan yang disampaikan sebelumnya selalu dialami oleh masyarakat di seluruh Indonesia. sehingga perlu dibuat kebijakan untuk mengatasi berbagai masalah tersebut.

Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Potensi dan Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata

Selain identifikasi secara langsung ke desa-desa, Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat melalui bidang Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan diperbantukan oleh Bidang SDM dan Kelembagaan juga melakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mengidentifikasi potensi dan pengembangan desa wisata di Kecamatan Kumai yang berlokasi di Kelapa Tindan dan Kecamatan Arut Selatan, kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Mendawai. menurut Rostini (2021), FGD merupakan sebuah metode pengumpulan data secara kolektif yang melibatkan banyak

orang. Pada kegiatan FGD tersebut dihadiri oleh perwakilan perangkat desa, Pokdarwis, tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat desa se Kecamatan Kumai dan Kecamatan Arut Selatan. Acara yang dilakukan sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Rostini (2021), dimana untuk mendapatkan data tentang potensi wisata, dapat menggunakan pendekatan FGD. Menambahkan tulisan Rostini, maka Amir dkk (2020), mengungkapkan bahwa dalam melakukan identifikasi potensi perlu melibatkan para pihak yang mengetahui tentang kondisi desa secara menyeluruh sehingga informasi yang disampaikan sesuai dan dapat mencari solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh masyarakat.

Setelah dilakukan identifikasi potensi dan permasalahan yang dialami oleh setiap desa disetiap Kecamatan yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat, maka dibentuk tim penetapan desa wisata yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melakukan Verifikasi dan Validasi terkait dengan penetapan desa wisata yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK).

Dalam buku pedoman yang dirilis oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf, (2021) terdapat empat kategori desa wisata, yaitu Rintisan, Berkembang, Maju dan Mandiri.

1. Rintisan

- a. Memiliki potensi untuk menjadi destinasi wisata.
- b. Sarana prasarana wisata masih terbatas.
- c. Wisatawan yang berkunjung masih berasal dari masyarakat sekitar.
- d. Belum adanya kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata.
- e. Diperlukan pendampingan dari pemerintah maupun swasta.
- f. Masih menggunakan Dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata .
- g. Pengelolaan desa wisata masih bersifat lokal.

2. Berkembang

- a. Wisatawan yang berkunjung tidak hanya berasal dari masyarakat sekitar tetapi juga dari luar daerah.
- b. Sarana prasarana dan fasilitas pariwisata sudah mulai berkembang
- c. Sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat.

3. Maju

- a. Masyarakat mulai sadar akan potensi wisata.
- b. Destinasi wisata sudah dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara.
- c. Sarana prasarana dan fasilitas pariwisata sudah memadai. Masyarakat memiliki pengetahuan serta keahlian dalam mengelola pariwisata melalui pokdarwis atau kelompok kerja lokal.
- d. Masyarakat memiliki berkemampuan memanfaatkan dana desa untuk pengembangan desa wisata.

- e. Sistem pengelolaan desa wisata memiliki dampak positif dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

4. Mandiri

- a. Masyarakat sudah berinovasi dalam pengembangan potensi wisata desa (diversifikasi produk) menjadi unit kewirausahaan yang mandiri.
- b. Destinasi wisatanya sudah dikenal oleh wisatawan mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia.
- c. Sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional minimal ASEAN.
- d. Pengelolaan desa wisata dilakukan secara kolaboratif antar sektor dan pentahellx sudah berjalan dengan baik.
- e. Dana desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi diversifikasi produk wisata di desa wisata.
- f. Desa sudah memanfaatkan teknologi digital sebagai bentuk promosi mandiri (mampu membuat bahan promosi dan menjual secara mandiri melalui digitalisasi dan teknologi).

Penentuan klasifikasi Desa Wisata diatas dapat dilakukan selambat-lambatnya dua tahun oleh Perangkat Desa yang membidangi pariwisata bersama dengan satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yang membidangi pemberdayaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Ketentuan lebih lanjut untuk tata cara perhitungan dan evaluasi dalam penentuan klasifikasi desa wisata di Indonesia akan diatur secara terpisah dalam petunjuk teknis penentuan klasifikasi Desa Wisata. Berdasarkan itulah sehingga Dinas Pariwisata Kabupaten yang diberikan kewenangan dalam melakukan penilaian dan Verifikasi melakukan tugas dan fungsinya sehingga telah mendapatkan hasil sebagai berikut :

Penetapan Desa Wisata

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, pada tahun 2021 Bupati Kotawaringin Barat telah menerbitkan Peraturan Bupati No. 26 tahun 2021 tentang Desa Wisata. Menindaklanjuti peraturan tersebut pada tahun 2022 telah dikeluarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No. 64 Tahun 2022 tentang penetapan desa wisata yang terdiri dari beberapa desa, dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Penetapan Desa Wisata Kotawaringin Barat

No	Nama Desa	Kategori
1	Desa Pasir Panjang	Maju
2	Desa Keraya	Bekembang
3	Desa Kumpai Batu Atas	Berkembang
4	Desa Pangkalan Dewa	Berkembang
5	Desa Pangkalan Tiga	Berkembang
6	Desa Arga Mulya	Berkembang

7	Desa Riam	Berkembang
8	Desa Rungun	Rintisan
9	Desa Pangkalan Banteng	Rintisan
10	Desa Berambai Makmur	Rintisan
11	Desa Panahan	Rintisan
12	Desa Penyombean	Rintisan
13	Desa Lada Mandala Jaya	Rintisan
14	Desa Sungai Sekonyer	Berkembang
15	Desa Sebuai	Rintisan
16	Desa Sungai Bakau	Rintisan
17	Desa Lalang	berkembang

Sumber: SK Bupati Kotawaringin Barat No. 65 Tahun 2022

Penetapan desa wisata diatas telah melalui Keputusan Bupati yang sudah melewati tahapan penilaian dan verifikasi mulai dari potensi, tatakelola dan lain sebagainya yang ada di desa tersebut. Masing-masing desa memiliki penciri khusus mulai dari kebudayaan, alam, buatan dan lain sebagainya.

Setelah dilakukan penetapan, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat, melakukan upaya dalam rangka pengembangan desa wisata dapat mengelola potensi yang dimiliki diantaranya yaitu pelatihan. Menurut Elfrianto (2016) Pelatihan sumber daya manusia merupakan kemestian bagi setiap organisasi maupun lembaga, karena penempatan sumber daya manusia secara langsung tanpa pembekalan atau pelatihan dalam pekerjaan tidak menjamin mereka akan berhasil. Maka dari itu Liyushiana (2023), menambahkan bahwa Kegiatan pelatihan dilakukan dengan gabungan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Selain itu, dilakukan juga pelatihan praktik. Hal tersebut juga dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat diantaranya:

1. Pelatihan Pemandu Wisata (APBD) tahun 2022

Pelatihan tersebut dilakukan dalam rangka memberikan pengetahuan kepada pemandu wisata pemula dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah

2. Pelatihan Pengelolaan Homestay (DAK Nonfisik Kemenparekraf Republik Indonesia) tahun 2023

Pelatihan Pengelolaan Usaha *Homestay*/Pondok Wisata yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kompetensi pengelola usaha *homestay*/pondok wisata supaya lebih professional dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan.

3. Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata (DAK Nonfisik Kemenparekraf Republik Indonesia) tahun 2023

pelatihan yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang kepariwisataan, Sapta Pesona dalam mewujudkan masyarakat Sadar Wisata, pengembangan kelembagaan pengelola desa wisata dan pengembangan serta pengelolaan produk pariwisata di desa wisata.

4. Pelatihan *Tost Front Office* (APBD) tahun 2023

pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang dasar-dasar Front Office bagi hotel dan homestay supaya memiliki Standar Kompetensi yang memadai di Kabupaten Kotawaringin Barat

5. Pelatihan Digitalisasi Branding Pemasaran dan Penjualan pada Desa Wisata, *Homestay/ Pondok Wisata, Kuliner, Souvenir dan Fotografer* (DAK Nonfisik Kemenparekraf Republik Indonesia) tahun 2023. Pelatihan Digitalisasi: *Branding, Pemasaran dan Penjualan pada Desa Wisata, Homestay/Pondok Wisata, Kuliner, Souvenir, Fotografi.*

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kompetensi pengelola destinasi agar dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemasaran pariwisata sehingga dapat meningkatkan daya tarik wisata.

6. Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (DAK Nonfisik Kemenparekraf Republik Indonesia) tahun 2023.

Pelatihan Pemandu Wisata Budaya memiliki bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi, serta kompetensi para pemandu wisata budaya agar dapat meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan pemanduan wisata kepada wisatawan.

Kegiatan pelatihan yang dijabarkan diatas merupakan upaya untuk meningkatkan SDM pengelola desa wisata yang tersebar di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulartiningrum dkk (2018) dimana diperlukannya Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM Bidang Pariwisata di Desa Wisata agar dapat mengembangkan pariwisata yang ada di desa tersebut. **Berdasarkan hasil penelitian menunjukan** bahwa terdapat dua sumber pendanaan dalam mengadakan pelatihan yaitu APBD Kabupaten Kotawaringin Barat dan DAK Nonfisik Kemenparekraf Republik Indonesia.

Untuk mengembangkan kepariwisataan maka Kementerian meningkatkan daya saing Indonesia antara lain penyediaan infrastruktur dan amenities pariwisata, peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja di sektor pariwisata, mendorong produktivitas tenaga kerja sektor pariwisata (pelayanan) disertai dengan pemberian skema insentif yang menarik, dan mendorong partisipasi tenaga kerja wanita di sektor pariwisata. Berdasarkan hal tersebut diatas, selain melalui dukungan pendanaan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pariwisata, dukungan DAK Nonfisik Bidang Pariwisata juga sangat diperlukan guna pembangunan kepariwisataan Indonesia

khususnya peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas sumber daya manusia bidang pariwisata. Di tahun 2023 terdapat empat kegiatan pelatihan yang dibiayai oleh DAK Nonfisik Kemenparekraf RI. Sedangkan untuk APBD di tahun 2022 ada satu kegiatan Pelatihan dan di tahun 2023 juga ada satu kegiatan pelatihan yang dialokasikan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Prestasi Desa Wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat

Setelah dilakukan berbagai kegiatan oleh Dinas Pariwisata seperti pelatihan, pendampingan dan lainnya bagi pengelola desa wisata sehingga dua Desa Wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan prestasi. Menurut Mawarni & Fitriani (2019) Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan atau diciptakan. Desa Sei Sekonyer, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 meraih juara dua Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) kategori Daya Tarik Pengunjung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahyudi sebagai Kepala Dinas Pariwisata mengatakan bahwa dengan adanya prestasi ini memberikan gambaran bahwa desa wisata yang dikembangkan di Kabupaten Kotawaringin Barat mampu bersaing di level nasional.

Prestasi yang didapatkan pada Level Nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada program ADWI memiliki tujuan untuk menjadi daya ungkit bagi ekonomi desa dan sebagai wahana promosi untuk menunjukkan potensi desa-desa wisata di Indonesia kepada wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Menurut Regina (2022) Program tersebut pertama kali diadakan pada tahun 2021-2023. Dengan adanya program ADWI telah memberikan dampak bagi pertumbuhan/*Quantity* jumlah wisatawan dan *Qualitas Tourism* bagi desa wisata di seluruh Indonesia dan terus dikembangkan bagi daerah-daerah yang memiliki potensi wisata.

Dengan adanya semangat dari masyarakat dan dukungan dari pemerintah daerah sehingga pada tahun 2023, Desa Wisata Pasir Panjang Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) berhasil meraih prestasi, yaitu masuk dalam 75 Desa Wisata Terbaik dan meraih juara Harapan pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) pada tahun 2023 dalam kategori *Homestay* dan Toilet. Hasil wawancara dengan wahyudi mengatakan bahwa Prestasi kembali diraih oleh Desa Wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat, agar menjadi motivasi untuk desa-desa wisata lain yaitu sejumlah 17 desa wisata yang telah disahkan untuk terus mengembangkan potensi yang ada guna menarik wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

Dua prestasi yang telah didapatkan oleh Desa Sei Sekonyer dan Desa Pasir Panjang merupakan hasil kerja sama semua pihak salah satunya Peran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya Dinas Pariwisata.

Pemerataan desa wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat

Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Melalui pengembangan desa wisata diharapkan terjadi pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkesinambungan (Dewi dkk, 2013). Pemerataan idealnya dapat dirasakan oleh setiap desa wisata yaitu 17 desa wisata yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Tantangan kedepan adalah mendorong agar 15 desa wisata lainnya yang belum mendapatkan penghargaan dari Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) supaya dapat meningkatkan kualitas, sarana dan prasarana wisata. Dengan harapan pemerataan tersebut dapat memberikan *role model*/ contoh bagi pengembangan desa wisata.

Tahapan Pengembangan Desa Wisata

Dalam mengembangkan desa wisata, terdapat beberapa Langkah yang perlu dilakukan yaitu Identifikasi, Pelatihan dan pendampingan sebagai solusi pengembangan desa wisata (Windirah dan Arianti, 2013). Identifikasi bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis potensi serta permasalahan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat dari berbagai sektor salah satunya adalah Pariwisata (Wulandari, 2014). Hasil dari identifikasi diperoleh data sekunder maupun primer sehingga dapat menyusun dokumen program sebagai acuan guna melanjutkan langkah berikutnya untuk mengadakan pelatihan dari para pihak (Abay, 2018). Kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu Langkah untuk meningkatkan Sumberdaya Manusia Desa Wisata.

Pendidikan/pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 26 tentang Pendidikan Non formal, ayat 5 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan/ pelatihan bagi masyarakat berfungsi untuk membekali mereka pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berikut ini merupakan konsep tahapan dalam melakukan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Konsep Tahapan Pelatihan Berkelanjutan

Diagram alur pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh para pihak seperti (Pemerintah, Akademisi, Bisnis, Media, Lembaga Keuangan dan lain sebagainya) dimulai dari hasil identifikasi dan analisis potensi serta masalah yang dialami oleh desa. Data tersebut dituangkan kedalam dokumen agar menjadi dasar untuk menyusun program pelatihan. Menurut Busono (2016) dan Fatimah (2013) Pelatihan yang baik perlu dilakukan analisis dan kajian terlebih dahulu sehingga dalam pelaksanaannya dapat menggunakan materi dan metode yang tepat guna, sehingga sesuai dengan tujuannya yaitu mengubah paradigma, meningkatkan kualitas dan lain sebagainya. Untuk memastikan bahwa semuanya itu dapat diimplementasikan dengan baik maka diperlukan pendampingan secara berkelanjutan agar teori yang disampaikan dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Begitu juga dalam melakukan pelatihan untuk pengembangan desa wisata. Rahmawati & Wijana (2019) mengungkapkan bahwa kegiatan pelatihan dan pendampingan merupakan cara untuk membantu masyarakat pengelola desa wisata dalam meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam mengelola desa wisata. Hal ini juga dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana kegiatan pelatihan yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan pariwisata dengan cara meningkatkan SDM para pelaku dan pengelola wisata, Pokdarwis dan para stakeholder terkait.

KESIMPULAN

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong daerah-daerah yang memiliki potensi daya tarik wisata untuk mengembangkan 57 sektor pariwisata. Kabupaten kotawaringin Barat merupakan salah satu daerah dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki beragam potensi wisata. Dengan beragam potensi yang dimiliki tersebut maka pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat membuat kebijakan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2021 tentang Desa wisata. Dengan adanya aturan tersebut maka Dinas Pariwisata bertugas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi khususnya dibidang Kepariwisataan. Selain itu dengan ditetapkannya 17 Desa wisata melalui SK Bupati Kotawaringin Barat No. 31 Tahun 2021 dan SK Bupati Kotawaringin Barat No. 65 Tahun 2022, maka dalam mengembangkan desa wisata telah dilakukan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata diantaranya Identifikasi Potensi dan Identifikasi, kegiatan pelatihan yang didanai dari APBD dan DAK Non Fisik tahun 2021-2023 sebagian upaya menyelesaikan berbagai masalah yang dialami oleh desa wisata. Kegiatan-kegiatan tersebut membuahkan hasil yang positif dimana ada dua desa di Kabupaten Kotawaringin Barat yang mendapatkan prestasi yaitu pada tahun 2022, Desa Sei Sekonyer mendapat juara 2 Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) dan pada tahun 2023, Desa Pasir Panjang juga mendapatkan juara Harapan pada

Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) dalam kategori *Homestay* dan Toilet. Walaupun telah mendapatkan prestasi akan tetapi secara keseluruhan belum maksimal karena dari 17 desa wisata baru 2 desa wisata yang mendapatkan prestasi. Oleh karena itu diperlukan Langkah-langkah strategis sehingga dapat mendorong prestasi desa wisata lebih banyak dan dapat menetapkan lebih banyak lagi desa wisata yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, A., Sukarno, T. D., & Rahmawati, F. 2020. Identifikasi Potensi dan Status Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan*. Volume 4 Nomor 2: 84-98
DOI: <http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.2.84-98>
- Dewi M. H. U., Fandeli, C., & Baiquni, M. 2013. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Kawistara*, Vol. 3, No. 2: 117-226
- Elfrianto. 2016. Manajemen Pelatihan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan. *Jurnal EduTech* Vol. 2 No. 2 September 2016: 46-58
<https://media.neliti.com/media/publications/54626-ID-manajemen-pelatihan-sumber-daya-manusia.pdf>
- Ibrahim, F. 2011. Pemetaan Objek Wisata Dan Prasarana Pendukung Di Kabupaten Brebes Bagian Selatan Menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS). *Skripsi*. Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
<https://lib.unnes.ac.id/7910/1/10651.pdf>
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2021. Pedoman Desa Wisata.
- Regina, M. 2022. Analisa SWOT Akun Instagram @jadesta.official Sebagai Media Promosi Desa Wisata di Indonesia. *Jurnal IMPRESI* Volume 3 Nomor 1.
- Liyushiana. 2023. Pelatihan Tata Kelola Destinasi Berbasis Chse Di Desa Timbang Jaya, Kabupaten Langkat. *Sawala: Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat*. Volume 4 Nomor 2: 87-94
<https://jurnal.unpad.ac.id/sawala/article/view/46794/pdf>
- Mawarni, F., & Fitriani. 2019. Peningkatan Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Materi Pokok Teks Eksposisi di Kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Sembawa Kabupaten Banyuasin. *PEMBAHSI: Jurnal Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia*. Volume 9 Nomor 2: 1-14
- Moleong, L. J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya. Bandung
- Nugroho, 2020. Beberapa Masalah Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Di Indonesia. *Pariwisata*, Vol. 7 No. 2: 124-131
- Patadjenu, S., Silitonga, M.S & Asropi, A. 2023. Tata Kelola Kolaboratif Pengembangan Pariwisata Likupang, Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, Volume 17 Nomor 1:
<http://ejournal.kememparekraf.go.id/index.php/jki/article/view/574/82>
- Rijali, A. 2018. Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*. Vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018
<https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374>

- Rostini, I. A., & Rudiyanto, R. (2021). Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Identifikasi Potensi Wisata dalam Pengembangan Desa Watu Tiri Sebagai Desa Wisata. *Jurnal Abdimas Pariwisata*, 2 (1), 8–13. <https://doi.org/10.36276/jap.v2i1.23>
<https://jurnal.ampta.ac.id/index.php/JAP/article/view/23>
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Bandung
- Sulartiningrum, S., Nofiyanti, F & Fitriana, R. Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM Bidang Pariwisata di Desa Wisata. *Jurnal SOLMA*. Vol 7. Nomor 2.
- Spillane, James. 2004. *Ekonomi Pariwisata : Sejarah dan Prospeknya*. Kanisius. Yogyakarta
- UU Kepariwisata No. 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Yuningsih, N. 2005. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pengembangan Potensi Obyek Wisata Pantai Pangandaran Di Kabupaten Ciamis Jawa Barat. *Skripsi: Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang*.